

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA TEGAL**



**TUGAS AKHIR**

**OLEH :**

**NABILA SYAHRANI ANNISA**

**NIM 18030073**

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI**

**POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA**

**2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGAL

oleh mahasiswa :

Nama : Nabila Syahrani Annisa

NIM : 18030073

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing  
menyetujui bahwa mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 18 Juni 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II



Ririh Sri Harjanti, S.E, MM, CTT

NIPY. 04.015.215



Aryanto, S.E, M. Ak, CAAT

NIPY. 11.011.098

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGAL

Oleh :

Nama : Nabila Syahrani Annisa

NIM : 18030073

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal

Tegal, 06 Juli 2021

1. Ririh Sri Harjanti, S.E., M.M., CTT  
Ketua Penguji



2. Erni Unggul Sedya Utami., S.E., M.Si  
Penguji 1



3. Nurul Mahmudah, S.E., M.Si, Ak, CAAT  
Penguji 2



Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



Yeni Priatna Sari, SE, Msi, Ak, CA

NIPY. 03.013.142

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGAL” beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 18 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Nabila Syahrani Annisa

NIM 18030073



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Mahasiswa Program studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabila Syahrani Annisa

NIM : 18030073

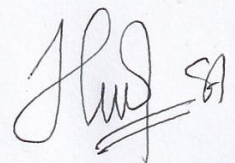
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, meyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Harapan Bersama **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Noneexclusive Royalty Free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal”

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 18 Juni 2021



Nabila Syahrani Annisa

NIM 18030073

## HALAMAN MOTTO

“...dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”

(Yusuf : 87)

“Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

(Al Anfal : 46)

“Jangan menyerah sekarang! Impianmu akan menjadi nyata. Jika kau tidak berjalan hari ini, kau tidak akan bisa berlari esok hari”

(Mark Lee)

“Jika kita mencari kata lain dari ‘penderitaan’, maka kata itu adalah ‘mimpi’. Kita harus mau menerima penderitaan dan tetap gigih untuk bisa mewujudkan mimpi kita”

(Nadhifa Allya Tsana)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT yang selalu memberikan rizki kesehatan dan kemudahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
- ❖ Keluargaku tercinta, kedua orang tuaku, kakek nenek, kakakku serta adikku yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dukungan, motivasi baik secara moril maupun materil. Serta pengorbanan yang telah diberikan.
- ❖ Teruntuk sahabatku Yustika dan Nisa serta anggota Tax Center 2020 dan grup Jasuke yang telah memberi warna warni dimasa kuliah serta selalu memberi dukungan sampai akhir perjuangan bahwa kita bisa melewati semuanya dengan baik.
- ❖ Teman-teman seperjuangan kelas C angkatan 2018 terimakasih atas kebersamaannya selama 3 tahun ini.
- ❖ Teruntuk teman-teman onlineku yang selalu support selalu, terutama EXO-I dan NCTzen. Terimakasih atas dukungan yang diberikan.
- ❖ Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Tugas Akhir. Terima kasih

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal”

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Nizar Suhendra, S.E., MPP selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama
2. Ibu Yeni Priatna Sari, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Ka.Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama
3. Ibu Ririh Sri Harjanti, S.E, MM, CTT sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini
4. Bapak Aryanto S.E, M. Ak, CAAT , selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini
5. Bapak Muhammad Riza selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dan Bapak Wahyu Wicaksono dan Bapak Beni selaku Koordinator Relawan Pajak di KPP Pratama Tegal yang telah memberikan bantuan, ilmu serta pengalaman selama melaksanakan penelitian.
6. Seluruh karyawan dan karyawan Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Pratama Tegal yang telah memberikan bantuan selama melaksanakan penelitian.



7. Teman-teman di kampus dan teman-teman anggota Tax Center 2020 serta kawan-kawan Relawan Pajak 2021 yang telah memberikan dukungan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu selesainya Tugas Akhir ini.

Peneliti menyadari bahwa Tugas akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan di sana-sini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca serta pemerhati pada umumnya.

Tegal, 18 Juni 2021



Nabila Syahrani Annisa

NIM. 18030073

## ABSTRAK

Nabila Syahrani Annisa. 2021. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Tegal*. Program Studi : Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Ririh Sri Harjanti, S.E., M.M., CTT; Pembimbing II: Aryanto, S.E., M.Ak, CAAT.

Penerimaan negara paling besar perannya berasal dari sektor pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Maka dari itu perlu dilakukan tindakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi belum tentu menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal selama tahun 2015-2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan jumlah sampel 198.067 wajib pajak. Teknik analisis data adalah kuantitatif dengan uji asumsi klasik (uji normalitas), uji hipotesis dan uji regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

**Kata Kunci :** Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan

## ABSTRACT

**Annisa, Nabila Syahrani.** 2021. *The Influence of Individual Taxpayer Compliance on Income Tax Revenue of Individual Taxpayers at KPP Pratama Tegal.* Study Program : Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Ririh Sri Harjanti. S.E., M.M., CTT; Co-Advisor: Aryanto, S.E., M.Ak, CAAT

*The largest role of state revenue comes from the tax sector. Taxes are people's contributions to the state treasury based on the law. Therefore, it is necessary to take action to increase tax revenue. The increasing number of individual taxpayers does not necessarily indicate an increase in taxpayer compliance in submitting annual tax returns on time. This study was aimed to analyze the effect of individual taxpayer compliance on income tax receipts of individual taxpayers. The data collection techniques were observation, interviews and literature study. The population of this research was individual taxpayers registered at KPP Pratama Tegal during 2015-2019. The sampling technique was purposive sampling with a sample of 198.067 taxpayers. Data analysis technique is quantitative with classical assumption test (normality test), hypothesis test and simple regression test. The results of this study indicate that there is no effect of individual taxpayer compliance on income tax receipts of individual taxpayers.*

**Key Words :** *Taxpayer Compliance, Income Tax Receipt*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7

1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Batasan Masalah.....	8
1.6 Kerangka Berpikir .....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Gambaran Umum Perpajakan.....	13
2.1.1 Pengertian Pajak.....	13
2.1.2 Fungsi Pajak.....	14
2.1.3 Jenis Pajak.....	14
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	16
2.2 Wajib Pajak .....	18
2.2.1 Pengertian Wajib Pajak.....	18
2.2.2 Wajib Pajak Orang Pribadi .....	19
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak .....	20
2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.3.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak .....	21
2.4 Penerimaan Pajak .....	22
2.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak.....	22
2.4.2 Indikator Penerimaan Pajak .....	22
2.5 Hipotesis Penelitian.....	23
2.6 Penelitian Terdahulu.....	24

BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Lokasi Penelitian .....	28
3.2 Waktu Penelitian .....	28
3.3 Jenis Data.....	28
3.4 Sumber Data .....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.6 Populasi dan Sampel.....	31
3.7 Definisi Operasional Variabel .....	32
3.8 Metode Analisis Data .....	32
3.8.1 Uji Asumsi Klasik.....	33
3.8.2 Uji Regresi Sederhana.....	33
3.8.3 Uji Hipotesis .....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	36
4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Tegal.....	36
4.1.1 Sejarah Berdirinya KPP Pratama Tegal .....	36
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Tegal .....	39
4.1.3 Kedudukan dan Wilayah Kerja KPP Pratama Tegal .....	39
4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Tegal.....	40
4.2 Hasil Analisis Data .....	43
4.2.1 Data Tingkat Kepatuhan WPOP dan Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP di KPP Pratama Tegal.....	43

4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	45
4.2.3 Uji Regresi Sederhana.....	46
4.2.4 Uji Hipotesis .....	48
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	49
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>52</b>
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran .....	52
5.2.1 Saran untuk KPP Pratama Tegal .....	53
5.2.2 Saran untuk Peneliti Selanjutnya .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>



## DAFTAR GAMBAR

1. 1 Kerangka Berpikir .....	9
3. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Tegal .....	41

## DAFTAR TABEL

1. 1 Peran Pajak terhadap APBN Tahun 2015 – 2019 .....	2
1. 2 Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Tegal .....	4
4. 1 Jumlah WPOP yang terdaftar dan WPOP Efektif di KPP Pratama Tegal .....	44
4. 2 Tingkat Kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu..	44
4. 3 Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP di KPP Pratama Tegal .....	45
4. 4 Hasil Uji Normalitas .....	46
4. 5 Uji Regresi Sederhana.....	47
4. 6 Uji Hipotesis .....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Tanda Terima Permohonan e-riset .....	57
2. Tanda Persetujuan Izin e-riset.....	58
3. Output SPSS Uji Normalitas.....	59
4. Output SPSS Uji Regresi Sederhana.....	59
5. Data Rekapitulasi Kepatuhan WPOP.....	61
6. Data Rekapitulasi Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP.....	61
7. Buku Bimbingan Pembimbing 1 .....	62
8. Buku Bimbingan Pembimbing 2.....	64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia termasuk kedalam negara yang berkembang, dimana negara Indonesia sedang gencar-gencarnya untuk melakukan pembangunan. Pembangunan tersebut khususnya pada infrastruktur guna mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dalam pembangunan infrastruktur tersebut pemerintah memerlukan sumber dana. Sumber dana tersebut didapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang didalamnya berasal dari berbagai sumber dana dari berbagai sektor. Sektor tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah. Penerimaan negara yang paling besar perannya dalam APBN berasal dari sektor pajak. Alhasil kontribusi penerimaan perpajakan terus dioptimalkan oleh pemerintah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata serta mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan efisien dan efektif. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam (Resmi, 2014:1) <sup>[1]</sup> pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur,

pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas umum guna membangun masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, pajak dapat dikatakan sebagai bahan bakar utama untuk membangun negara. Tanpa penerimaan pajak yang sesuai, negara dapat mengalami kebangkrutan sehingga angka kesenjangan sosial akan semakin naik. Maka dari itu, setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara untuk membiayai pembangunan begitu pula sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia, pada tahun 2017 pajak menyumbang angka sebesar 85,64% (kemenkeu.go.id) <sup>[2]</sup>

**Tabel 1. 1 Peran Pajak terhadap APBN Tahun 2015 – 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase Pajak</b>
<b>Anggaran</b>	<b>APBN</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>	<b>terhadap APBN</b>
2015	1.793,6	1.201,7	66,9%
2016	1.822,5	1.546,7	84,8%
2017	1.750,3	1.498,9	85,6%
2018	1.894,7	1.618,1	85,4%
2019	2.165,1	1.786,4	82,4%

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2015-2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pajak terhadap Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sangat tinggi. Tingginya kontribusi pajak terhadap Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) membuat pemerintah cukup bergantung pada pajak. Pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara diharapkan mampu menjalankan program-program pembangunan nasional. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai cara agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat maksimal. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pembaharuan pajak atau reformasi pajak.

Reformasi pajak adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan penerimaan pajak. Reformasi pajak yang pertama dilakukan pada tahun 1983. Sekarang ini, negara Indonesia sedang dalam melakukan reformasi jilid III yang sudah berlangsung sejak tahun 2017 dan memiliki target hingga tahun 2024. Reformasi pajak yang dilakukan pada tahun 1983 yaitu mengubah sistem pemungutan dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Perbedaan dari kedua sistem tersebut terletak pada tanggung jawab pemungutan pajak. Pada *Official Assesment System*, tanggung jawab pemungutan pajak sepenuhnya terletak pada pemerintah yang menentukan besarnya pajak yang terutang, sedangkan pada *Self Assesment System* tanggung jawab dipegang oleh wajib pajak itu sendiri untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016:9)<sup>[3]</sup>

Dalam *Self Assesment System* inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak

dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran serta patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. *Self Assesment Sysytem* menuntut adanya peran aktif dari masyarakat khususnya wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dianutnya *Self Assesment System* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assesment System*. Faktor penting dalam melaksanakan *Self Assesment System* adalah kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak.

**Tabel 1. 2 Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Tegal**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan</b>	<b>Realisasi Penerimaan</b>
<b>Pajak</b>	<b>Pajak</b>	<b>Pajak</b>
2015	239.924.000.311	221.100.990.680
2016	274.693.130.528	147.325.337.433
2017	296.506.489.604	142.353.596.941

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Tegal

Dalam tabel diatas, terlihat jika keadaan penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan dalam hal realisasi penerimaan pajak. Maka dari itu perlunya dilakukan tindakan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi belum tentu menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tepat waktu



dalam menyampaikan SPT Tahunan. Yang menjadi hambatan bagi para wajib pajak terlambat melaporkan SPT Tahunan adalah tidak atau kurang memahami mengenai prosedur dan tata cara pelaporan SPT yang baik dan benar. Adapun yang paham, namun pada saat mengisi SPT mereka kurang teliti dalam perhitungan jumlah PPh bahkan terdapat SPT yang tidak lengkap. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) juga bisa menjadi hambatan bagi para Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya. SDM yang tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak. Terbatasnya SDM ini yang menyebabkan Wajib Pajak kurang puas dengan pelayanan yang ada sehingga memilih untuk tidak melakukan kewajiban perpajakannya dalam hal melaporkan SPT tahunan tepat waktu.

Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal. Lokasi ini dipilih karena tingkat kepatuhan WPOP yang masih rendah. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu yang terjadi di KPP Pratama Tegal pada tahun 2017 sebesar 30% hal itu dapat dilihat dari WPOP yang terdaftar pada tahun 2017 sebanyak 297.039 tetapi yang melaporkan SPT tepat pada waktunya hanya 44.395 orang. Sedangkan pada tahun 2016 sebesar 24% dari jumlah WPOP yang terdaftar sebanyak 267.093 tetapi yang melaporkan SPTnya hanya 33.871 orang.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini khususnya Ditjen Pajak harus mampu memberikan jaminan serta kepastian kepada wajib pajak dalam hal perlakuan yang adil dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak.

Usaha untuk meningkatkan Wajib Pajak dirasa belum maksimal, masih banyak Wajib Pajak yang enggan untuk patuh dalam aturan undang-undang. Pelaporan SPT menjadi indikator presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi presentase pelaporan SPT maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dalam penelitian yang dilakukan (Suryaman, 2015) <sup>[4]</sup> didapatkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cibinong. Namun sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Alfian, 2013) <sup>[5]</sup> menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan.

Dengan melihat hasil penelitian yang berbeda-beda, maka peneliti terdorong untuk menguji dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dengan wajib pajak orang pribadi sebagai objek penelitian. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan adalah “Bagaimana pengaruh

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah apa yang ingin dicapai dengan penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Seorang peneliti mempunyai tujuan untuk mendapatkan manfaat dari penelitiannya baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah seperti berikut ini :

#### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi peneliti khususnya dibidang perpajakan terkait kepatuhan pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak

#### **2. Bagi Politeknik Harapan Bersama Tegal**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan landasan penelitian untuk penelitian berikutnya terutama penelitian terkait perpajakan di Indonesia bagi mahasiswa Politeknik harapan Bersama Tegal

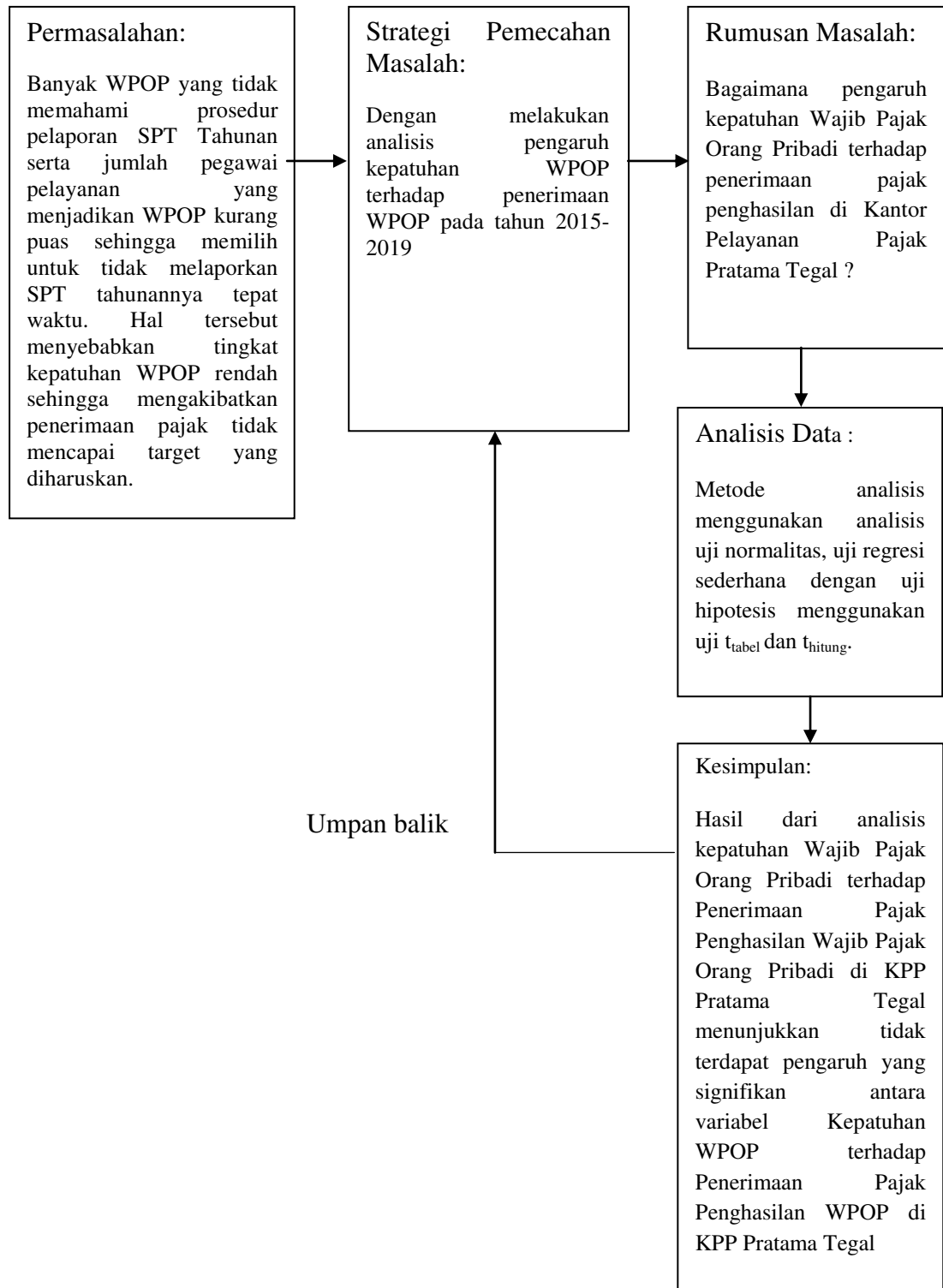
### 3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah maka permasalahan dibatasi hanya pada pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan pajak Pratama Tegal pada tahun 2015-2019.

## 1.6 Kerangka Berpikir



**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir**

## 1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan dapat memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

### 1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, inti sari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

### 2. Bagian Isi, terdiri dari lima bab diantaranya :

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan Tugas Akhir.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat penjelasan terkait pengertian pajak, fungsi pajak, jenis pajak, tata cara pemungutan pajak,

sistem pemungutan pajak, wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan pajak.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan ruang lingkup penelitian, populasi dan pemilihan sampel, pengumpulan data dan pengukuran variabel, prosedur analisis data yang terdiri atas analisis regresi sederhana beserta kriteria pengambilan simpulan atas pengujian yang dilakukan dalam penelitian.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil pemilihan sampel, hasil pengambilan data, deskripsi data penelitian, hasil analisis data penelitian, hasil pengujian hipotesis, dan interpretasi data serta pembahasan hasil pengolahan data dari pengujian hipotesis.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran serta implikasi hasil penelitian baik bagi pihak yang terkait dengan penelitian.

### DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir



### 3. Bagian Akhir

#### LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan selama penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Gambaran Umum Perpajakan**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Definisi Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 <sup>[6]</sup> tentang perubahan ke-empat atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”(Narwanti, 2018)

Menurut S. I. Djajaningrat dalam (Resmi, 2014:1) <sup>[1]</sup>, pajak sebagai sesuatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Sedangkan menurut Dr. N. J. Feldmann dalam (Resmi, 2014:2) <sup>[1]</sup>, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari beberapa pendapat para ahli terkait pengertian pajak diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada

negara yang merupakan kontribusi wajib kepada negara dan bersifat memaksa berdasar undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun dipergunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan pembangunan nasional bagi kemakmuran masyarakat.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Resmi (2014:3) <sup>[1]</sup> fungsi pajak ada dua, diantaranya :

#### **1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)**

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber pemasukkan negara, pemerintah berupaya untuk memasukkan penerimaan sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

#### **2. Fungsi Pengatur (*Regularend*)**

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam sektor sosial dan ekonomi, serta mempunyai tujuan-tujuan tertentu diluar sektor keuangan.

### **2.1.3 Jenis Pajak**

Menurut Resmi (2014:7) <sup>[1]</sup> jenis-jenis pajak dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

#### **1. Menurut Golongan, ada 2 macam pajak diantaranya :**

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri atau dibebankan kepada Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan atau ditanggung kepada orang lain atau pihak manapun. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat ditanggung atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifat, pajak digolongkan menjadi 2 diantaranya :

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang dasar pengenaannya memperhatikan kondisi pribadi subjek pajak dalam hal ini Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang dasar pengenaannya memperhatikan objeknya yang berupa benda, kondisi atau perbuatan yang mengakibatkan kewajiban dalam membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi 2 diantaranya :

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja negara.

Contoh : PPh, PPN dan PPnBM

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai belanja daerah

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran

#### **2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak (Mardiasmo 2016:8) <sup>[3]</sup>

1. Stelsel Pajak, dibagi menjadi 3 tahap yaitu :

a. Stelsel Nyata (*rielt stelsel*)

Merupakan pemungutan pajak yang dasar pengenaannya didasarkan pada penghasilan yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sebenarnya diketahui.

b. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Merupakan pemungutan pajak yang dasar pengenaannya didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Yaitu penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun yang sebelumnya.

c. Stelsel Campuran

Merupakan gabungan dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Dimana pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan stelsel anggapan namun pada akhir tahun besarnya pajak dihitung pada penghasilan yang sebenarnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

Asas pengenaan pajak dibagi menjadi 3, diantaranya :

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Dimana negara berhak untuk mengenakan pajak atas semua pendapatan Wajib Pajak yang berdomisili di wilayahnya (dalam negeri), baik dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri.

b. Asas Sumber

Dimana negara berhak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang berdomisili di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal dari Wajib Pajak sendiri.

c. Asas Kebangsaan

Dimana dasar pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 sistem dasar pemungutan pajak, diantaranya :

a. *Official Assesment System*

*Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan hak kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang bagi Wajib Pajak.

b. *Self Assesment System*

*Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi hak, kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

c. *Withholding System*

*Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak dengan memberikan hak kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## 2.2 Wajib Pajak

### 2.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2014:19) <sup>[1]</sup>. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan



ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak ataupun pemotongan pajak tertentu (Rahman : 2010) <sup>[7]</sup>

### **2.2.2 Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang atau individu yang mempunyai penghasilan netto dalam satu tahun diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Wajib pajak orang pribadi sendiri dikategorikan menjadi 3 yaitu orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti pegawai atau karyawan.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 <sup>[8]</sup> tentang PPh (Pajak Penghasilan) wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi 8 diantaranya :

1. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. (karyawan, PNS)
2. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. (Pengusaha toko sepatu, Pengusaha industri krupuk kulit)
3. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. (Dokter, Notaris, Konsultan)
4. Wajib pajak prang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. (Bunga pinjaman, Royalti)
5. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersifat final. (Hadiah undian, Deposito)

6. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan termasuk objek pajak. (bantuan, sumbangan)
7. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. (buga, royalti)
8. Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari berbagai sumber penghasilan. (Pegawai swasta yang juga mempunyai usaha rumah makan)

## **2.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepatuhan sendiri mempunyai arti tunduk atau patuh pada ajaran maupun aturan. Dalam dunia perpajakan kepatuhan peajak merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self assesment system, dimana setiap wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Menurut Norman D. Nowark yang dikutip S. K. Rahayu (2010:138) <sup>[9]</sup> terdapat dua macam kepatuhan, diantaranya :

1. Kepatuhan Formal, merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan

2. Kepatuhan Material, adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak secara hakikat telah memnuhi ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan dasar undang-undang perpajakan

### **2.3.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Suandy (2011:97) <sup>[10]</sup> kriteria Wajib Pajak dapat diukur atas dasar:

1. Patuh terhadap kewajiban intern, yaitu dimana dalam pembayaran serta pelaporan SPT Masa, SPT PPN setiap bulannya.
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yaitu dimana dalam perhitungan pajak atas dasar self assesment system, dari melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak serta tidak memiliki kredit pajak atau melunasi pajak yang terutang.
3. Patuh terhadap ketentuan materil melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

Sedangkan menurut Sri dan Ita (2009) dalam (S. K. Rahayu, 2013:138) <sup>[9]</sup> menjelaskan bahwa kepatuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam kondisi dimana :

1. Wajib pajak memahami atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
5. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak.

Adapun rumus yang digunakan dalam mengetahui Jumlah WPOP Efektif dapat dihitung seperti berikut :

**Jumlah WPOP Efektif :**

= WPOP terdaftar – WPOP non efektif

Untuk mengetahui rasio kepatuhan WPOP efektif dalam penyampaian SPT menggunakan rumus sebagai berikut :

**Rasio Kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT tepat waktu**

=  $\frac{\text{Jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tepat Waktu}}{\text{Jumlah WPOP Efektif}} \times 100\%$

## 2.4 Penerimaan Pajak

### 2.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Hutagaol, 2017)<sup>[11]</sup>.

Sedangkan menurut (Hanum, 2018) <sup>[12]</sup> penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Dan kas negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2.4.2 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut (Hanum, 2018) <sup>[12]</sup> Indikator penerimaan pajak sebagai berikut :

1. Peran Penerimaan Pajak

2. Sumber Penerimaan Pajak
3. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak

Adapun rumus perhitungan untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal, sebagai berikut :

$$= \frac{\text{realisasi penerimaan pajak penghasilan WPOP}}{\text{target penerimaan pajak penghasilan WPOP}} \times 100\%$$

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 132) <sup>[13]</sup> hipotesis adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka berpikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

Menurut penelitian (Suryaman, 2015) <sup>[4]</sup> menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pasal 21/26 diukur dari perhitungan rasio kepatuhan dalam menyampaikan SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak Orang pribadi dan ketepatan dalam menyetorkan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibinong. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>a</sub> : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi

H<sub>0</sub> : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian dan pembahasan yang peneliti dapat, maka dapat diambil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

NO.	Nama Peneliti (Tahun) “Judul Penelitian “	Permasalahan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rahmat Alfian (2012) ”Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Surabaya Krembangan”	Salah satu penerimaan negara terpenting adalah sektor perpajakan. Tapi faktanya tetap seperti itu banyak wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran perpajakan dalam kewajiban perpajakannya.	Data penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar, jumlah wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak, dan jumlah penerimaan pajak yang masuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Model regresi digunakan sesuai dengan asumsi tes klasik. Teknik analisis data yang digunakan linier sederhana teknik analisis regresi.	Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan penerimaan perpajakan dalam Pajak Kantor Utama Krembangan Surabaya.

2	Deni Suryaman (2015) “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Cibinong”	Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan wajib pajak yang teah memenuhi sebagai wajib pajak akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak, apabila dalam kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak yang dirasakan masih rendah selama ini.	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis Deskriptif Kuantitatif dengan menggunakan Statistik Parametrik, untuk menganalisis variabel terkait dan variabel bebas dengan hubungan sebab akibat	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong.
3	Asep Muhamad Mulya Fermana (2015) “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap	Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama penerimaan negara. Sehingga penerimaan pajak sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode veerifikatif yang menjadi unit observasi dalam penelitian ini adalah 15 KPP	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan jumlah wajib

	Penerimaan Pajak Di Kanwil Djp Jabar 1”	Banyak faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan perpajakan. Dalam penelitian ini jumlah kepatuhan wajib pajak dan efektifitas wajib pajak sebagai sarana untuk meningkatkan penerimaan perpajakan.	di DJP Jabar 1	pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan wajib pajak.
4	Dwinta Mulyanti dan Febby Sry Sugiharty (2016) “Efektifitas Wpop Dan Tingkat Kepatuhan Wpop Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan”	Fenomena yang terjadi adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah karena masih banyaknya jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku	Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi dan Tingkat Kepatuhan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sumedang khususnya.
5	Rezky Romansyah Hameto (2017) “Pengaruh	Untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya	Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, data	Hasil penelitian ini memperoleh bahwa secara parsial



	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Gorontalo”	PPH Pasal 25 orang pribadi tentunya harus didukung oleh peningkatan pajak penghasilan dan juga harus dibarengi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya	yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan analisis dan pengujian secara statistik.	kepatuhan WPOP hanya jumlah wajib pajak dan jumlah SPT dilaporkan tepat waktu yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi. Secara simultan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPH Pasal 25 orang pribadi.
--	--	---	--	--

Sumber : Google Scholar, diluncurkan tahun 2004 mencakup jurnal-jurnal online dari publikasi ilmiah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono No. 05 Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut strategis dan tepat untuk dijadikan objek penelitian dan lokasi tersebut juga digunakan sebagai lokasi kegiatan Relawan Pajak yang dilakukan oleh peneliti.

#### **3.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, terhitung dari tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021

#### **3.3 Jenis Data**

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Data Kualitatif**

Menurut Suliyanto (2005:134) <sup>[14]</sup> data kualitatif adalah data dalam bentuk kata-kata atau bukan dalam bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti profil dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal, struktur organisasi dari KPP Pratama Tegal sendiri.

## 2. Data Kuantitatif

Menurut Suliyanto (2005:135) <sup>[14]</sup> data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal, jumlah wajib pajak orang pribadi status non efektif, jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tepat waktu, jumlah target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal.

### 3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1) Data Primer

Menurut Suliyanto (2005:131) <sup>[14]</sup> data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, data primer seperti sejarah dan struktur organisasi KPP Pratama Tegal

#### 2) Data Sekunder

Menurut Suliyanto (2005:132) <sup>[14]</sup> data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dimaksud seperti data tentang jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Tegal, jumlah WPOP berstatus non efektif, jumlah WPOP yang menyampaikan SPT tepat waktu, target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data maupun keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Menurut Sugiyono (2014 : 145) <sup>[13]</sup> observasi adalah teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan langsung pada instansi dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 2. Wawancara

Menurut Suliyanto (2004 : 137) <sup>[14]</sup> wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini.

#### 3. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2012 : 291) <sup>[13]</sup> studi pustaka adalah kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literature ilmiah.

### 3.6 Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

(Sugiyono, 2012) <sup>[13]</sup> berpendapat bahwa, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan oleh peneliti sebanyak 1.510.121 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal selama tahun 2015 - 2019.

#### 2. Sampel

(Sugiyono, 2012) <sup>[13]</sup> berpendapat bahwa, “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau kriteria-kriteria tertentu. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal selama tahun 2015 - 2019 dengan status aktif
2. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal selama tahun 2015 - 2019 yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu

Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* didapat jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 198.067 wajib pajak.

### 3.7 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2012 : 59) <sup>[13]</sup> variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel diantaranya :

#### 1. Variabel Independen

Menurut Suliyanto (2005 : 77) <sup>[14]</sup> variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab besar kecilnya variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam penelitian ini, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dilihat dari WPOP yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.

#### 2. Variabel Dependen

Menurut Suliyanto (2005 : 78) <sup>[14]</sup> variabel dependen adalah variabel yang variasinya dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang dimaksud adalah penerimaan pajak penghasilan WPOP, dimana variabel ini dapat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak.

### 3.8 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 3.8.1 Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi yang baik harus memenuhi tidak adanya masalah asumsi klasik dalam modelnya. Jika terdapat asumsi klasik, maka model regresi tersebut masih memiliki bias. Jika suatu model masih terdapat adanya masalah asumsi klasik, maka akan dilakukan langkah revisi model ataupun penyembuhan untuk menghilangkan masalah tersebut. Pengujian asumsi klasik akan dilakukan melalui uji- uji sebagai berikut:

#### 3.8.1.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011:160) <sup>[15]</sup> “Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal.”

Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual* atau dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Untuk mengetahui normal atau tidaknya data penelitian, maka pada penelitian ini menggunakan metode uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Jika hasil uji *Kolmogorov Smirnov* lebih besar dari 0,05 atau nilai  $p > \text{Sig}=0,05$  maka suatu model regresi dikatakan normal dan berlaku juga sebaliknya.

### 3.8.2 Uji Regresi Sederhana

Menurut Ghozali (2011) <sup>[15]</sup> analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen. Regresi ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana.

Persamaan regresi sederhana dengan satu predictor menurut Sugiyono (2012:188) <sup>[13]</sup> dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Nilai yang diprediksikan

a = Konstanta atau bila harga X = 0

b = Koefisien regresi, yaitu angka yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Jika b (+) maka menunjukkan peningkatan dan sebaliknya jika b (-) maka menunjukkan penurunan variabel dependen.

X = Nilai variabel independen

### 3.8.3 Uji Hipotesis

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji hipotesis yaitu membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Dasar pengambilan keputusan dalam uji hipotesis ini dengan melihat nilai t, dimana :



- a. Jika nilai  $t_{hitung}$  lebih besar  $>$  dari  $t_{tabel}$ , maka terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y)
- b. Jika nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil  $<$  dari  $t_{tabel}$  maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y)

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Tegal**

##### **4.1.1 Sejarah Berdirinya KPP Pratama Tegal**

Pada bulan Juni 1964, pemerintah mendirikan Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Drs. Soejono Brotodiharjo. Wilayah kerja Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan meliputi wilayah Karisedenan Pekalongan yang termasuk didalamnya Kabupaten Tegal dan Brebes, sementara Kota Tegal pada waktu itu belum terbentuk.

Melalui Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I Tegal, upaya untuk mengeksplorasi potensi pajak terus digalakan seiring dengan pertumbuhan ekonomi di kedua daerah tersebut. Kota Tegal pada saat itu hingga sekarang tidak hanya terkenal dengan produksi gula dan tebu, tetapi juga terkenal dengan daerah penghasil ikan. Selain itu juga dikembangkan pertanian bawang putih yang lokasinya berada di sekitar daerah Gunung Slamet. Untuk daerah Kota Brebes sendiri terkenal dengan pertanian bawang merah dan cabai merah yang luas dan mampu memproduksi kedua komoditi tersebut dengan jumlah yang besar. Bahkan produksi bawang merah dan cabai merah merupakan stok nasional untuk komoditi tersebut.

Melihat kondisi yang memungkinkan untuk berkembang, seiring dengan peningkatan potensi ekonomi masyarakat, maka Dirjen Pajak

agar Kantor Dinas Luar (KDL) menjadi Kantor Inspeksi Tegal. Dan tahun 1970 Menteri Keuangan memberikan persetujuan untuk meningkatkan status sebagai Kantor Inspeksi Pajak Tegal yang diresmikan langsung oleh Dirjen Pajak Drs. Sutadi Sukarya. Untuk sementara waktu pimpinan kantor dijabat oleh Soeryodiningrat sebagai Kepala Bagian Pajak Langsung. Beberapa bulan kemudian pimpinan baru dilantik, yang pertama adalah Drs. Setyarso dan kemudian diteruskan oleh :

1. Drs. H. Amron Loebis
2. Drs. C. B. Noibarnu
3. Drs. Soeharto
4. Drs. Sampurna Ribudi
5. Drs. H. Soemartoyo
6. Drs. Djangatas Karo Karo
7. Drs. Suwandi
8. Asrosi Chusnan, S.H
9. Abdurochim, S.H M.M
- 10.Drs. Wiwit Mudjikan

Sesuai dengan Kebijakan Dirjen Pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pajak, nama Kantor Inspeksi Pajak Tegal kemudian diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan didasari bahwa dewasa ini tugas Dirjen Pajak juga mengutamakan

pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat terutama bagi wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tegal berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal (KPP Pratama Tegal) dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern pada tahun 2008 berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang “Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dengan Kepala Kantor sebagai berikut :

1. Drs. Moh. I. Budhy Triwindhu
2. Drs. Suwarno, MBA.
3. Adilega Tanius
4. Johny Victor
5. Budi Gunawan
6. Muhammad Riza

KPP Pratama Tegal sejak masih bernama KDL Tingkat I dan Kantor Inspeksi Pajak Tegal telah mengalami perpindahan lokasi kantor. Dimulai saat masih menempati gedung milik Negara yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo hingga saat ini berada di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 5 Kota Tegal.

#### **4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Tegal**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi KPP Pratama Tegal yaitu menjadikan KPP yang handal, inovatif dan akuntabel dalam melayani wajib pajak. Misi KPP Pratama Tegal adalah melayani wajib pajak secara optimal untuk mewujudkan wajib pajak yang sadar dan patuh pajak. Motto KPP Pratama Tegal adalah melayani dengan prima, profesional, ramah, integritas, mudah, dan akurat.

#### **4.1.3 Kedudukan dan Wilayah Kerja KPP Pratama Tegal**

KPP Pratama Tegal termasuk kedalam unit koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, terletak pada jalur lalu lintas utara (pantura) yang menghubungkan Kota Jakarta dengan Surabaya. KPP Pratama Tegal memiliki luas wilayah kerja sekitar 458.339 km yang terdiri dari tiga daerah meliputi :

- a. Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal.
- b. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
- c. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes

Dengan batasan wilayah sebagai berikut :

- a. Laut Jawa sebagai batas wilayah utara
- b. Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes sebagai batas wilayah selatan.

- c. Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sebagai batas wilayah timur
- d. Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes sebagai batas wilayah barat.

#### **4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Tegal**

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai pembagian tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing seksi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi juga dapat berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan pembagian tugas yang jelas secara terorganisir. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 49 Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi di KPP Pratama Tegal sebagai berikut :

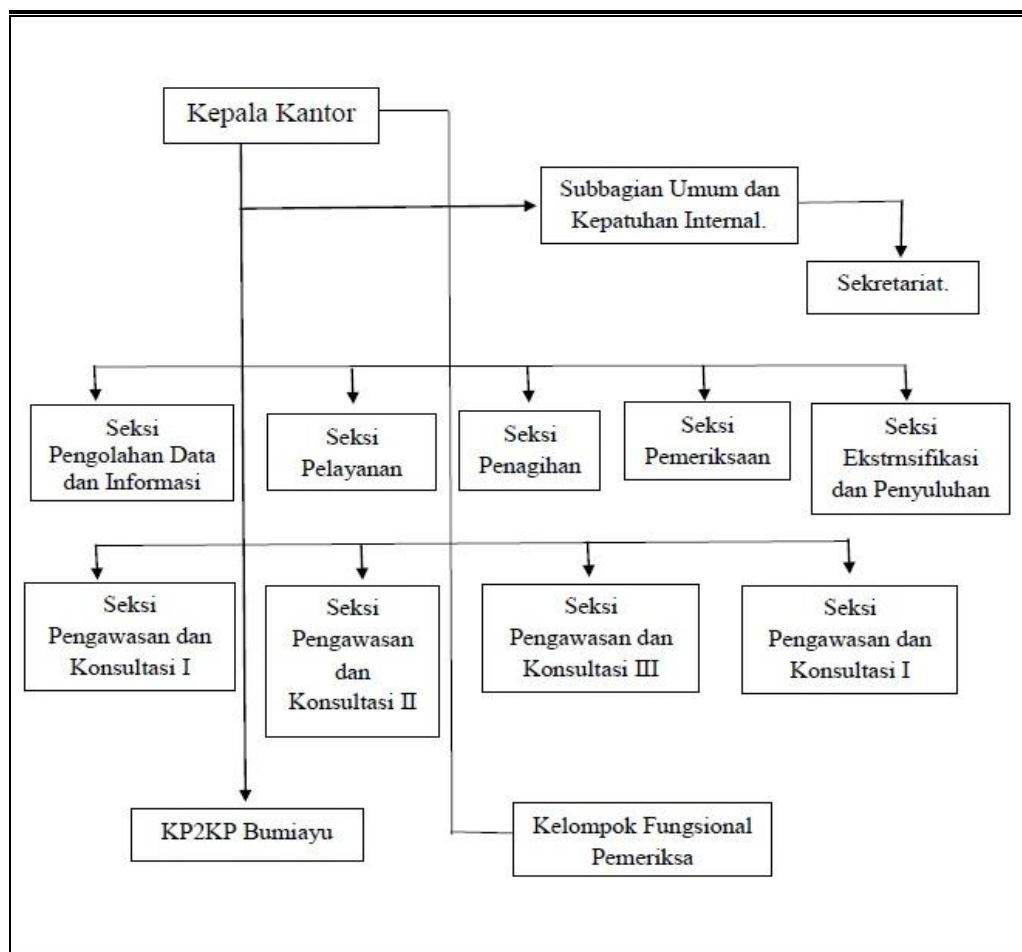
1. Kepala Kantor
2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI)
3. Sekretariat
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
5. Seksi Pelayanan
6. Seksi Penagihan
7. Seksi Pemeriksaan
8. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I s.d IV

10. KP2KP Bumiayu

11. Kelompok Fungsional Pemeriksa

Untuk menjelaskan lebih lanjut, berikut gambaran struktur organisasi di KPP Pratama Tegal



**Gambar 3. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Tegal**

Sumber : KPP Pratama Tegal

Adapun rincian tugas masing-masing bagian yang harus dilaksanakan oleh KPP Pratama Tegal sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor, mempunyai tugas melakukan pengordinasian dalam bentuk pelaksanaan penyuluhan, pelayanan serta pengawasan wajib pajak.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI), mempunyai tugas membantu dan menunjang kelancaran tugas kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan pelayanan kesekretarian..
- c. Sekretariat, mempunyai tugas pengadministrasian hak-hak pegawai seperti hak cuti, asuransi kesehatan, pengangkatan pegawai, pengajuan pensiun dan sebagainya.
- d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), mempunyai tugas melakukan pengumpulan, dan pengolahan data, penyajian data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, memantau aplikasi e-SPT dan e-Filing serta menyiapkan laporan kinerja.
- e. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melaksanakan penerbitan produk hukum pajak, mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan, melakukan penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, memberi penyuluhan perpajakan, melaksanakan registrasi WP
- f. Seksi Penagihan, mempunyai tugas melaksanakan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.



- g. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pemeriksaan, mengawasi pelaksanaan aturan pemeriksaan, menerbitkan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
- h. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, mempunyai tugas pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan subjek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi.
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WasKon) I, II, III dan IV mempunyai tugas mengawasi kepatuhan WP (PPh, PPN, dan Pajak lainnya), bimbingan serta himbauan kepada WP terkait teknis perpajakan.
- j. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bumiayu mempunyai tugas melayani konsultasi pajak, menyusun rencana dan melaksanakan penyuluhan kepada WP.

## **4.2 Hasil Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan 2 variable yang terdiri dari satu variabel dependen yaitu variabel penerimaan pajak penghasilan WPOP. Variabel independen yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **4.2.1 Data Tingkat Kepatuhan WPOP dan Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP di KPP Pratama Tegal**

#### **1. Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal**

Berdasarkan rumus perhitungan dalam menghitung jumlah WPOP efektif, maka didapat data sebagai berikut. Dibawah ini merupakan tabel jumlah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak efektif di KPP Pratama Tegal dalam kurun waktu lima tahun belakang (2015-2019)

**Tabel 4. 1 Jumlah WPOP yang terdaftar dan WPOP Efektif di KPP Pratama Tegal**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Jumlah WPOP Yang Terdaftar</b>	<b>Jumlah WPOP Berstatus NE</b>	<b>Jumlah WPOP Efektif</b>
2015	238.448	109.560	128.888
2016	267.093	127.750	139.343
2017	297.039	146.939	150.100
2018	333.098	148.660	184.438
2019	372.397	148.752	223.645

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Tegal

Berdasarkan rumus perhitungan untuk menghitung tingkat kepatuhan WPOP maka diperoleh hasil sebagai berikut. Dibawah ini merupakan tabel Rasio Tingkat Kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan tepat waktu di KPP Pratama Tegal dalam kurun waktu lima tahun belakang (2015-2019)

**Tabel 4. 2 Tingkat Kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Jumlah WPOP Efektif</b>	<b>Jumlah WPOP yang Melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu</b>	<b>Tingkat Kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu</b>
2015	128.888	29.612	23%
2016	139.343	33.871	24%
2017	150.100	44.395	30%

2018	184.438	47.486	26%
2019	223.645	42.703	19%

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Tegal

## 2. Data Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP di KPP Pratama Tegal

Berdasarkan rumus perhitungan untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak penghasilan WPOP di KPP Pratama Tegal, maka didapat data sebagai berikut :

**Tabel 4. 3 Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP di KPP Pratama Tegal**

Tahun	Target Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP	Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP	Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP
2015	269.924.000.311	221.100.990.680	82%
2016	274.693.130.528	147.325.337.433	54%
2017	296.506.489.604	142.353.718.167	48%
2018	373.620.940.000	133.331.596.941	36%
2019	405.140.505.028	155.366.040.467	38%

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Tegal

### 4.2.2 Uji Asumsi Klasik

#### 4.2.2.1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah  $\alpha = 0,05$ . Dasar pengambilan keputusan adalah dengan melihat dari angka probabilitas  $\rho$ , dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika nilai probabilitas  $\rho \geq 0,05$  , maka asumsi normalitas terpenuhi

- b. Jika nilai probabilitas  $\rho < 0,05$  , maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Hasil output dari pengujian normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,18490162
Most Extreme Differences	Absolute	,245
	Positive	,245
	Negative	-,194
Test Statistic		,245
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data diolah dari SPSS, 2021

Hasil uji normalitas menggunakan *standardized residual* di atas, diperoleh nilai signifikansi *Komogorov-Smirnov* yaitu sebesar 0,200. Angka sig. *Kolmogorov-Smirnov* tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tarif signifikansi 5% (0,05) atau sig > 0,05. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa data kedua variabel terdistribusi normal.

#### 4.2.3 Uji Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh hubungan (asosiasi) antara dua variabel yaitu X (independen)

dan variabel Y (dependen). Dalam penelitian ini, analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Kepatuhan WPOP (X) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y). Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi sederhana dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) dimana :

- a. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil < dari probabilitas 0,05, maka terdapat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
- b. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar > dari probabilitas 0,05, maka tidak terdapat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

**Tabel 4. 5 Uji Regresi Sederhana**

Model	Coefficients <sup>a</sup>		t	Sig.	
	Unstandardized				Standardized
	B	Std. Error			Coefficients Beta
1 (Constant)	,457	,668	,684	,543	
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (X)	,241	2,686	,052	,090	

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP (Y)

Sumber : Data diolah dari SPSS, 2021

Hasil pengujian menggunakan SPSS menunjukkan bahwa pada nilai signifikansi sebesar 0,934 yang lebih besar dari probabilitas 0,05. Hal demikian berarti Kepatuhan WPOP tidak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan

Pajak Penghasilan. Berdasarkan tabel di atas juga dapat diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = 0,457 \beta + 0,241 X$$

**Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP = 0,457 + 0,241 Kepatuhan WPOP**

Persamaan regresi tersebut mempunyai penjelasan sebagai berikut :

1. Konstanta = 0,457

Jika variabel kepatuhan WPOP dianggap sama dengan nol, maka variabel penerimaan pajak penghasilan WPOP sebesar 0,457

2. Koefisien Regresi = 0,241

Jika variabel kepatuhan WPOP mengalami kenaikan satu poin, maka menyebabkan kenaikan variabel penerimaan pajak penghasilan WPOP sebesar 0,241

#### 4.2.4 Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis ini, sering disebut juga dengan uji t, dimana dasar pengambilan dalam uji t adalah sebagai berikut :

- c. Jika nilai  $t_{hitung}$  lebih besar  $>$  dari  $t_{tabel}$ , maka terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y)
- d. Jika nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil  $<$  dari  $t_{tabel}$  maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y)

Kriteria pengambilan keputusan  $t_{tabel}$  :

- a. Probability ( $\alpha$ ) = 0,05
- b. Derajat kebebasan (df) =  $n - k - 1$

$$= 42.703 - 5 - 1$$

$$= 42.697$$

- c. Dalam perhitungan  $t_{\text{tabel}}$  menggunakan excel, dengan rumus  $=\text{TINV}(0,05;42.697)$  maka diperoleh hasil  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,960

**Tabel 4. 6 Uji Hipotesis**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized		Standardized		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,457	,668		,684	,543
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (X)	,241	2,686	,052	,090	,934

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP (Y)

Sumber : Data diolah dari SPSS, 2021

Hasil pengujian statistik menggunakan SPSS pada variabel X (Kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu) diperoleh nilai  $t_{\text{hitung}} = 0,684 < 1,960 = t_{\text{tabel}}$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_a$  ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh antara Variabel X terhadap Variabel Y (Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP).

### 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data diatas, maka hipotesis yang dapat diterima adalah  $H_0$  yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi sementara  $H_a$  ditolak. Hal itu dibuktikan dengan nilai  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 0,684

yang lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,960 dengan signifikansi sebesar 0,934 yang lebih besar dari nilai probabilitas sebesar 0,05.

Faktor yang menyebabkan tidak berpengaruhnya Kepatuhan WPOP terhadap penerimaan pajak penghasilan dimungkinkan bisa disebabkan karena jumlah wajib pajak efektif yang tidak seluruhnya menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu, serta adanya jumlah wajib pajak efektif yang berubah status menjadi wajib pajak berstatus NE. Perubahan status tersebut disebabkan oleh adanya WPOP yang menjalankan usaha maupun pekerjaan bebas tidak lagi menjalankan usaha dan tidak lagi melakukan pekerjaan bebas sehingga penghasilannya dibawah PTKP, ataupun dikarenakan WPOP sendiri yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan sebagai wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari (Alfian, 2013) <sup>[5]</sup> yang menghasilkan bahwa tidak terdapat pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini juga mendukung penelitian menurut (Pangemanan, 2013) <sup>[16]</sup> yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tidak berpengaruh terhadap penerimaan, hal itu ditunjukkan dari naik turunnya jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tidak mendukung adanya peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Berbeda dengan hal tersebut, hasil penelitian lain yang dilakukan oleh (Suryaman, 2015) <sup>[4]</sup> menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pasal 21/26 diukur dari perhitungan rasio kepatuhan dalam



menyampaikan SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak Orang pribadi dan ketepatan dalam menyetorkan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Tegal, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Tegal. Hal itu dibuktikan dimana tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT tepat waktu mengalami kenaikan tapi tidak diikuti oleh penerimaan pajak penghasilan.
2. Jumlah wajib pajak efektif orang pribadi di KPP Pratama Tegal sudah mengalami pertumbuhan yang sangat baik, hal itu dibuktikan dari peningkatan jumlah wajib pajak efektif setiap tahunnya.
3. Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT tepat waktu masih tergolong rendah, dan penerimaan pajak penghasilan belum mampu melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

#### **5.2 Saran**

Setelah peneliti memberikan simpulan dari hasil penelitian mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan, maka peneliti akan memberikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan dimasa yang akan datang sebagai berikut :

### **5.2.1 Saran untuk KPP Pratama Tegal**

Adapun saran untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal yang dapat diajukan sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak KPP Pratama Tegal meningkatkan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat baik di kantor instansi dan umum, supaya nantinya wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang perpajakan dalam pelaporan SPT
2. Hendaknya petugas pajak (fiskus) menekankan kepada wajib pajak terkait sanksi ketidapatuhannya dalam menyampaikan laporan SPT Tahunan.
3. Hendaknya petugas pajak (fiskus) melakukan penagihan yang lebih intensif dalam merealisasi target penerimaan pajak penghasilan yang sudah ditentukan.

### **5.2.2 Saran untuk Peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel independen yang sudah ada dalam penelitian ini yang mungkin dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi seperti tingkat intelektualitas masyarakat, kualitas fiskus dan sistem administrasi perpajakan yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Resmi, Siti. 2014. *“Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1”*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- [2] Kementrian Keaungan Republik Indonesia. 2019. *Data Pokok APBN 2015-2019*
- [3] Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Ketujuh. Yogyakarta : ANDI
- [4] Suryaman, Deni 2015. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong*. Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi (JIMFE) Vol 1 No 1 Tahun 2015, Hal 25-31
- [5] Rahmat Alfian. 2013. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Surabaya Krembangan*. Jurnal Akuntansi UNESA Vol I No 3.
- [6] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [7] Rahman, Abdul. 2010. *Administrasi Perpajakan*. Bandung : Nuansa
- [8] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) Tentang Pajak Penghasilan
- [9] Siti, Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- [10] Erly, Suandy. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- [11] Hutagaol, J. 2017. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta : Graha Ilmu

- [12] Hanum, Z 2018. *Analisis Penyampaian SPT dan Jumlah Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan*. Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 18 (2)
- [13] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&D*. Cetakan Kedua puluh. Bandung : Alfabeta
- [14] Suliyanto. 2005. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta : ANDI
- [15] Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS IBM SPSS19*. Edisi Kelima. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- [16] Pangemanan, Rima Naomi. 2013. *Hubungan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Tanda Terima Permohonan e-riset



### e-Riset : Tanda Terima Permohonan Izin Riset

1 pesan

**Eriset Direktorat Jenderal Pajak** <riset@pajak.go.id>

Sab, 27 Mar 2021 pukul 21.25

Balas ke: [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id)

Kepada: [nabilasyahraniannisa75@gmail.com](mailto:nabilasyahraniannisa75@gmail.com)

#### BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN RISET

Nomor : 03001-2021  
 Tanggal : 27 Maret 2021  
 Nama : Nabila Syahrani Annisa  
 NIM : 18030073  
 Kategori riset : Gelar-D3  
 Jurusan : Diii Akuntansi  
 Fakultas : Diii Akuntansi  
 Perguruan Tinggi : Politeknik Harapan Bersama  
 Judul Riset : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Tegal  
 Izin yang diminta : Data,

Terima kasih. Permohonan izin Riset Anda telah kami terima. Gunakan nomor layanan di atas untuk memantau proses penyelesaian permohonan Anda pada laman [edukasi.pajak.go.id](http://edukasi.pajak.go.id).



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

#### PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4

## Lampiran 2. Tanda Persetujuan Izin e-riset



### e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>  
Balas ke: riset@pajak.go.id  
Kepada: nabilasyahraniannisa75@gmail.com

Rab, 21 Apr 2021 pukul 15.49



#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381  
TELEPON 024-3540416,3545075,3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S- Semarang , 21 April 2021  
268/RISET/WPJ.10/2021  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Nabila Syahrani Annisa**

Jl. Werkudoro Rt 003 Rw 005 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **03001-2021** pada **27 Maret 2021**, dengan informasi:

NIM : 18030073  
Kategori riset : Gelar-D3  
Jurusan : Diii Akuntansi  
Fakultas : Diii Akuntansi  
Perguruan Tinggi : Politeknik Harapan Bersama  
Judul Riset : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Tegal  
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Tegal**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **21 April 2021 s/d 20 Oktober 2021**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Mulyanto Budi Santosa



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.



### Lampiran 3. Output SPSS Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,18490162
Most Extreme Differences	Absolute	,245
	Positive	,245
	Negative	-,194
Test Statistic		,245
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

### Lampiran 4. Output SPSS Uji Regresi Sederhana

#### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu (X) <sup>b</sup>	.	Enter
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP (Y)			
b. All requested variables entered.			

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change
1	,052 <sup>a</sup>	,003	-,330	,21351	,003	,008	1	3	,934
a. Predictors: (Constant), Kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu (X)									

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,000	1	,000	,008	,934 <sup>b</sup>
	Residual	,137	3	,046		
	Total	,137	4			
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP (Y)						
b. Predictors: (Constant), Kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu (X)						

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,457	,668		,684	,543		
	Kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu (X)	,241	2,686	,052	,090	,934	1,000	1,000
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP (Y)								

**Lampiran 5 Data Rekapitulasi Kepatuhan WPOP yang Melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu**

**KEPATUHAN WPOP TH 2015-2019**

<b>TAHUN PAJAK</b>	<b>JUMLAH WPOP YG TERDAFTAR</b>	<b>JUMLAH WPOP STATUS NE</b>	<b>JUMLAH WPOP EFEKTIF</b>	<b>JUMLAH WPOP YG MELAPORKAN SPT TEPAT WAKTU</b>	<b>TINGKAT KEPATUHAN WPOP</b>
2015	238.812	91.830	146.982	29.612	20%
2016	267.489	96.030	171.459	33.871	20%
2017	297.454	99.424	198.030	44.395	22%
2018	333.529	101.120	232.409	47.486	20%
2019	372.837	101.175	271.662	42.703	16%
<b>JUMLAH</b>	<b>1.510.121</b>	<b>489.579</b>	<b>1.020.542</b>	<b>198.067</b>	<b>98%</b>

**Lampiran 6 Data Rekapitulasi Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP**

**JUMLAH PENERIMAAN WPOP TH 2015-2019**

<b>TAHUN PAJAK</b>	<b>TARGET PENERIMAAN PAJAK WPOP</b>	<b>REALISASI PENERIMAAN PAJAK WPOP</b>	<b>TINGKAT PENERIMAAN PAJAK WPOP</b>
2015	269.924.000.311	221.100.990.680	82%
2016	274.693.130.528	147.325.337.433	54%
2017	296.506.489.604	142.353.718.167	48%
2018	373.620.940.000	133.331.596.941	36%
2019	405.140.505.028	155.366.040.467	38%
<b>JUMLAH</b>	<b>1.619.885.065.471</b>	<b>799.477.683.688</b>	<b>258%</b>

## Lampiran 7 Buku Bimbingan Pembimbing 1

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
01.	18 /feb 2021	Pengajuan Judul	
02.	23 /mar 2021	Pengajuan Proposal TA	
03.	17 /Apr 2021	Rev. 1 Proposal TA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latar belakang</li> <li>• kerangka berpikir</li> <li>• sumber kutipan</li> </ul>	
04.	25 /Apr 2021	Rev. 2 Proposal TA <ul style="list-style-type: none"> <li>• kerangka berpikir</li> <li>• latar belakang perkenalkan KPP</li> <li>• Hipotesis penelitian</li> <li>• Metode analisis data</li> <li>• teknik pengumpulan data</li> </ul>	
05.	28 /Apr 2021	Rev. 3 Proposal TA <ul style="list-style-type: none"> <li>• populasi dan sampel ditambahkan</li> <li>• indikator perhitungan rasio kepatuhan WPOP</li> <li>• langkah melakukan penelitian</li> </ul>	
06.	29 /Apr 2021	Rev. 4 Proposal TA <ul style="list-style-type: none"> <li>• kerangka berpikir</li> <li>• populasi dan sampel</li> </ul>	
07.	02 /Mei 2021	Rev. 5 Proposal TA <ul style="list-style-type: none"> <li>• kerangka berpikir</li> </ul>	
08.	03 /Mei 2021	Rev. 6 Proposal TA	
09.	03 /Mei 2021	Acc Proposal TA	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
  2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
  3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
10.	31/ Mei 2021	Pengajuan TA (bab 1-3)	
11.	09/ Juni 2021	Pengajuan TA (bab 1-5)	
12.	18/ Juni 2021	Acc Tugas Akhir	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
  2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
  3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

## Lampiran 8 Buku Bimbingan Pembimbing 2

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
01	13 / Feb 2021	Pengajuan Judul TA	
02	23 / mar 2021	Pengajuan Proposal TA	
03	07 / Apr 2021	Revisi 1 Proposal TA <ul style="list-style-type: none"> <li>• manfaat penelitian bagi masyarakat dihapus</li> <li>• kerangka berpikir pada bagian permasalahan</li> <li>• sistematika penulisan</li> <li>• penelitian terdahulu, tujuan penelitian dihapus</li> <li>• metode analisis data, uji F dihapus</li> </ul>	
04	14 / Apr 2021	Revisi 2 Proposal TA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hipotesis Penelitian</li> <li>• Penelitian terdahulu, diurutkan dari th yg terbaru</li> </ul>	
05	25 / Apr 2021	Acc Proposal Tugas Akhir	
06	31 / Mei 2021	Pengajuan Tugas Akhir (Bab 1-3)	
07	09 / Juni 2021	Revisi 1 Tugas Akhir (Bab 1-3) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Format tabel</li> <li>• Latar belakang, judul nya di Tebal</li> <li>• Manfaat penelitian, bagi instansi diganti bagi KPP Pratama Tegal</li> <li>• Sistematika Penulisan</li> <li>• penomoran bab di tinjauan pustaka</li> </ul>	

- Catatan :
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
  2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
  3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
08	11 / Juni 2021	Revisi 2 Tugas Akhir (Bab I - IV) <ul style="list-style-type: none"> <li>• kerangka berpikir, tabel diganti gambar</li> <li>• gambaran lokasi penelitian diganti gambaran KPP Pratama Tegay</li> <li>• Analisis data</li> <li>• uji regresi sederhana</li> <li>• uji hipotesis, pada simbol diganti huruf a</li> </ul>	
09	14 / Juni 2021	Revisi 3 Tugas Akhir <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan jarak baris</li> </ul>	
10	15 / Juni 2021	ACC Tugas Akhir	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
  2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
  3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)